



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Materi Pelatihan Bagi Peserta Diklat “Pengelolaan Keuangan Daerah”
Edisi Tahun 2014

Materi Pelatihan

BAB V

SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Edisi Tahun 2014



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

KATA SAMBUTAN

Kapasitas sumber daya manusia yang andal di seluruh pemerintah daerah merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman para aparat pengelolaan keuangan daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) -Kementerian Keuangan sejak tahun 1981/1982 telah menyelenggarakan Kursus Keuangan Daerah (KKD).



Sementara itu, kegiatan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK) diselenggarakan sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, KKD dan KKDK dikerjasamakan dengan 7 perguruan tinggi negeri (selanjutnya dikenal dengan sebutan *center of excellences*), yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas (Unand), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Pelaksanaan KKD-KKDK terus mengalami penyempurnaan dan *updating* terutama terkait dengan kurikulum, satuan acara pembelajaran (SAP), dan modul. Pada tahun 2012, modul-modul kegiatan KKD-KKDK diseragamkan agar setiap lulusan mempunyai pemahaman yang sama atas materi yang diajarkan. Seiring dengan adanya transformasi kelembagaan DJPK dimana salah satu pilarnya adalah transformasi KKD/KKDK, maka perbaikan kualitas pelaksanaan KKD-KKDK terus dilanjutkan dan pada tahun 2014, DJPK mendapat dukungan dari *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)* untuk melakukan *updating* modul sekaligus menyesuaikannya menjadi modul terintegrasi yang nantinya akan dilakukan penjenjangan dari tingkat dasar (*basic*), menengah (*intermediate*), lanjutan (*advance*) dan *executive*. Hal tersebut dimaksudkan agar aparaturnya pengelola keuangan daerah dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam tahun 2015, akan diselenggarakan *In-House Training (Levelling end user training)* bekerjasama dengan 34 Badiklat Provinsi. Dalam rangka menunjang *In-House Training* tersebut, DJPK akan menyelenggarakan ToT Master Trainer dan ToT Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar baik di internal Kemenkeu maupun melibatkan wakil dari PTN yang tersebar di 34 provinsi.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)* dan mitra pelaksana AIPD yang telah mendukung pelaksanaan standarisasi materi pelatihan pengelolaan keuangan daerah ini. Kami berharap output dari modul integrasi ini akan memudahkan peserta dalam memahami pengelolaan keuangan daerah sehingga akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah ke depan. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun modul, pimpinan dan pengurus *center* penyelenggara kegiatan diklat pengelolaan keuangan daerah serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan standarisasi materi pelatihan pengelolaan keuangan daerah ini.

Diharapkan dengan kehadiran modul yang telah distandarisasi ini akan meningkatkan kualitas pemahaman seluruh stakeholder khususnya yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan daerah. Ke depan, modul terintegrasi ini dapat terus diupdate dan terjaga kualitasnya dengan baik serta juga memudahkan para pelatih dan penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan daerah dapat berkontribusi pada perwujudan tatalaksana pemerintahan yang baik, sehingga menghasilkan kebijakan dan layanan publik yang berkualitas tinggi.

Jakarta, November 2014
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E
NIP. 19580823 198210 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Sambutan	ii
Halaman Sub Judul	iii
Tim Penyusun/Editor	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Singkatan	xi
PENDAHULUAN	
A. Abstraksi	1
B. Tujuan Pelatihan	1
C. Peserta Pelatihan	1
D. Materi Pelatihan	2
E. Metode Pelatihan	3
F. Perlengkapan dan Fasilitas Pelatihan	3
G. Evaluasi Pelatihan	3
H. Sertifikat Pelatihan	3
TOPIK 1 KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
1.1 Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah	6
1.2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	8
1.3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	9
1.4 Pejabat Pengguna Anggaran/Barang	11
1.5 Pejabat Pembuat Komitmen	13
1.6 Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan	13
1.7 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	14
1.8 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	14
1.9 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	15
1.10 Bendahara & Sestim Perbendaharaan Negara	16
1.11 Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah	18
1.12 Soal Diskusi	18
TOPIK 2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH	
1.1 Urgensi SPIP	21
1.2 Pengertian dan Tujuan SPIP	22
1.3 Unsur-Unsur SPIP	22
1.3.1 Lingkungan Pengendalian	23
1.3.2 Penilaian Risiko	24
1.3.3 Kegiatan Pengendalian	25
1.3.4 Informasi dan Komunikasi	25
1.3.5 Pemantauan Pengendalian Internal	26

1.5	Soal Diskusi	27
TOPIK 3 SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS SKPD		
1.1	Tugas dan Wewenang Bendahara Penerimaan SKPD	30
1.2	Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan SKPD	31
1.3	Prosedur (Tata Cara) Pembukuan Bendahara Penerimaan SKPD	32
1.4	Prosedur (Tata Cara) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD	45
1.5	Soal Latihan	48
TOPIK 4 SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS PPKD		
1.1	Tugas dan Wewenang Bendahara Penerimaan PPKD	42
1.2	Prosedur Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di PPKD	42
1.3	Prosedur Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD	43
1.4	Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD	51
1.5	Soal Latihan	52
TOPIK 5 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS SKPD		
1.1	Pendahuluan	55
1.2	Deskripsi Pengeluaran Kas	56
1.3	Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD	57
1.4	Prosedur Pembayaran Belanja SKPD	59
1.5	Prosedur Pembukuan Belanja	78
1.6	Prosedur Pertanggungjawaban Belanja	81
1.7	Pengembalian Kelebihan Uang/Belanja	88
1.8	Soal Latihan	88
TOPIK 6 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS PPKD		
1.1	Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran PPKD	82
1.2	Prosedur Pembayaran Bendahara Pengeluaran PPKD	83
1.3	Prosedur Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD	83
1.4	Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD	87
1.5	Latihan Soal	90
TOPIK 7 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUD		
1.1	Jenis-Jenis Laporan Pertanggungjawaban BUD	93
1.2	Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BUD	94
1.3	Soal Latihan	95
1.4	Prosedur Pertanggungjawab Bendahara Pengeluaran PPKD	100
1.5	Latihan Soal	103
TOPIK 8 PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA		
		104

1.1	Informasi Kerugian Negara/Daerah	106
1.2	Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)	107
	8.2.1 Tugas TPKN	108
	8.2.2 Laporan Hasil Verifikasi TPKN	109
1.3	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)	111
1.4	Jangka Waktu Penggantian Kerugian Negara	113
1.5	Pembebanan Kerugian Negara Sementara	114
1.6	Penetapan Batas Waktu	114
	8.6.1 Pengajuan Keberatan atas SK PBW	117
1.7	Pembebanan Kerugian Negara	118
	8.7.1 Pelaksanaan Keputusan Pembebanan	119
1.8	Kadaluwarsa	119
1.9	Sanksi	120
1.10	Keputusan Pengadilan	121
1.11	Latihan Soal	121
TOPIK 9 SIMULASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH		
1.1	Simulasi Penatausahaan Penerimaan Kas SKPD	124
	9.1.1 Contoh pembukuan transaksi	124
	9.1.2 Latihan pembukuan dan pertanggungjawaban	125
1.2	Simulasi Penatausahaan Pengeluaran Kas SKPD	127
	9.2.1 Contoh pembukuan transaksi	127
	9.2.2 Latihan pembukuan dan pertanggungjawaban	134
1.3	Simulasi Penatausahaan Penerimaan Kas PPKD	137
	9.3.1 Contoh pembukuan transaksi	137
	9.3.2 Latihan pembukuan dan pertanggungjawaban	138
1.4	Simulasi Penatausahaan Pengeluaran Kas PPKD	138
	9.4.1 Contoh pembukuan transaksi	138
	9.4.2 Latihan pembukuan dan pertanggungjawaban	140
DAFTAR PUSTAKA		141

PENDAHULUAN

A. Abstraksi

Secara umum, modul Sistem dan Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan Daerah ini membahas mengenai sistem dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan bendahara pemerintah daerah dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bendahara daerah yang dimaksud adalah mulai dari bendahara SKPD, bendahara PPKD hingga BUD. Namun demikian, proporsi materi di dalam modul ini lebih menekankan pada sisdu penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara SKPD, karena sebagian besar peserta pelatihan umumnya berasal dari SKPD.

Modul ini disusun untuk menyediakan materi pokok pada Pelatihan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah yang diselenggarakan oleh Center-Center penyelenggara KKD/KKDK kerja sama dengan Dirjen Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan. Modul ini dikembangkan per topik dengan maksud agar pembahasan menjadi lebih fokus. Pada setiap topik akan diawali dengan uraian deskripsi topik, sub topik, kata kunci, dan referensi; selanjutnya diuraikan pembahasan teori dan diakhir setiap topik akan dilengkapi dengan latihan soal. Modul ini terdiri dari 9 (sembilan) topik dengan sistematika penyajian seperti dijelaskan dibagian berikutnya.

B. Tujuan Pelatihan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu memahami teori (aturan) maupun praktik sisdu penatausahaan perbendaharaan daerah, dengan penekanan pada penatausahaan pelaksanaan anggaran SKPD, sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan Permendagri lainnya yang terkait antara lain Permendagri No. 13 Tahun 2013 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya sebagaimana dimuat di dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011.

C. Peserta Pelatihan

Modul ini digunakan untuk Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK) Penatausahaan Perbendaharaan Daerah. Pelatihan ini terutama diperuntukan bagi:

- Bendahara Penerimaan SKPD / Bendahara Penerimaan Pembantu
- Bendahara Pengeluaran SKPD / Bendahara Pengeluaran Pembantu
- Bendahara Penerimaan PPKD
- Bendahara Pengeluaran PPKD
- Staf pada PPK-SKPD
- Pembantu Bendahara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah ini dapat terselesaikan. Modul ini digunakan didalam Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kompetensi peserta di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan didalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di setiap daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Proses perencanaan dan penganggaran pada prakteknya melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan. Peran serta masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menampung berbagai masukan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Proses perencanaan tersebut dituangkan dalam UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri 54/2010.

Tindak lanjut fase perencanaan adalah proses penganggaran yang melibatkan banyak pihak baik DPRD maupun SKPD. Berbagai usulan program dan kegiatan perlu ditampung dan disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan. Proses koordinasi dan sinkronisasi diatur dalam PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007 jo Permendagri 21/2011. Terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sedikit banyak telah mewarnai modul perencanaan dan penganggaran daerah ini.

Kami menyadari bahwa modul ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dalam penyempurnaan modul ini sehingga bisa menjadi acuan semua pihak terutama aparat pemerintah daerah.

Akhir kata, kami sangat berharap modul ini dapat bermanfaat terutama bagi peserta diklat guna meningkatkan kompetensinya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang turut mendukung dan memberikan saran dan arahan di dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, November 2014

Tim Penulis



Supported by:



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPO)



LPPM UB
Lembaga Penelitian Dan
Pengabdian kepada Masyarakat
UNIVERSITAS BRAJAYAYA